



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan arsip adalah adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
9. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
15. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
16. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
18. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis adalah untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB IV SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah kabupaten menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang *representative* sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
 - a. 000 Umum
 - b. 100 Pemerintahan
 - c. 200 Politik
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
 - e. 400 Kesejahteraan
 - f. 500 Perekonomian
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
 - h. 700 Pengawasan
 - i. 800 Kepegawaian
 - j. 900 Keuangan

BAB V PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip, terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal diluar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;

2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang 1 (satu) level dengan unit diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tertinggi; dan
 3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang 1 (satu) level diluar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tinggi.
- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang 1 (satu) tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tertinggi; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), disusun dalam daftar arsip dinamis yang diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. I kode angka 000 bidang tugas umum;
- b. II kode angka 100 bidang tugas pemerintahan;
- c. III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. IV kode angka 300 bidang tugas keamanan dan ketertiban;
- e. V kode angka 400 bidang tugas kesejahteraan;
- f. VI kode angka 500 bidang tugas perekonomian;
- g. VII kode angka 600 bidang tugas pekerjaan umum dan ketenagakerjaan;
- h. VIII kode angka 700 bidang tugas pengawasan;
- i. IX kode angka 800 bidang tugas kepegawaian; dan
- j. X kode angka 900 bidang tugas keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

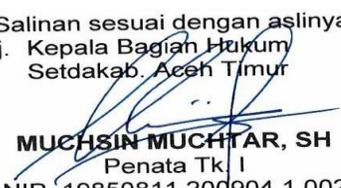
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

I. UMUM						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	002	Tanda kehormatan/penghargaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	003	Hari raya/besar	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	004	Ucapan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	005	Undangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	006	Tanda jabatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung kantor	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	012	Rumah dinas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	013	Akomodasi/persinggahan (mess/wisma/hotel)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	014	Rumah susun/apartemen	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	015	Peminjaman sarana dan prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop, dll)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	016	Pengurusan kendaraan dinas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	017	Keamanan/ketertiban kantor	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	018	Kebersihan kantor	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	019	Protokol	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
3	020	BARANG DAN JASA				
	021	Penawaran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	022	Barang	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	023	Jasa	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	024	Pakaian dinas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	025	Senjata	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/bangunan bersejarah)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	033	Tanaman	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	034	Alat-alat berat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	035	Hewan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	036	Barang persediaan dalam gudang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	037	Alat pengangkut (darat, laut, udara)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	038	Peralatan pabrik, laboratorium	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	039	Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	043	Kunjungan ke perpustakaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	045	Kearsipan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	046	Sandi	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak keamanan rahasia negara	Bidang Teknis
	047	Telegram, telex, radio, ISB	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	048	Data elektronik	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN				
	051	Laporan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	052	Evaluasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	053	Proyek bidang pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi instansi pemerintah (struktur organisasi)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	062	Organisasi badan non pemerintah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	063	Organisasi badan internasional	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	064	Organisasi semi pemerintah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	066	Tata hubungan kerja	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	067	Standar operasional prosedur	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	068	Evaluasi dan laporan ketatalaksanaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	069	Analisis jabatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset meliputi perizinan bagi peneliti, riset <i>design</i> , pembahasan sampai dengan laporan akhir riset	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	072	Pengembangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	073	Kajian	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	074	Kerjasama penelitian	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	075	Perekayasaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	077	Publikasi ilmiah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	084	Instansi lainnya	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	085	Internasional didalam negeri	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	086	Internasional diluar negeri	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	094	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas (ST)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	095	Perjalanan tamu asing ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	096	Perjalanan presiden dan wakil presiden keluar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	097	Perjalanan menteri keluar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	098	Perjalanan pejabat tinggi ke luar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	099	Perjalanan pegawai keluar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

II. PEMERINTAHAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	100	PEMERINTAHAN				
	101	GDN (Gerakan Disiplin Nasional)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2	110	PEMERINTAHAN PUSAT				
	111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	113	Susunan kabinet	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	114	Kementrian Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	115	Kementerian lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	117	Lembaga non kementerian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	118	Otonomi daerah/desentralisasi/dekonsentrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	119	Kerjasama antar kementerian	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	120	PEMERINTAH PROVINSI				
	121	Gubernur	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	122	Wakil Gubernur	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	123	Sekretaris Daerah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	124	Badan-badan pertimbangan daerah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	125	Pembentukan/Pemekaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	126	Pembagian wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	127	Penyerahan urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	128	Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		- Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		- Laporan kinerja pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		- Monografi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		- Koordinasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	131	Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dsb	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati/Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dsb	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	134	Forum koordinasi pemerintah di daerah, meliputi Forkopimda	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	135	Pembentukan daerah/pemekaran wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	136	Pembagian wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	137	Penyerahan urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	138	Pemerintah wilayah kecamatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	139	Pemerintahan mukim	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5	140	PEMERINTAHAN DESA/GAMPONG				
	141	Pamong Desa/Gampong, meliputi : pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, serah terima, penghasilan dsb	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Gampong (APBDes/APBG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/Gampong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	144	Dewan Tingkat Desa/Gampong Tuha Peut, Tuha Lapan, Dewan marga, Rembug Desa/Gampong atau nama lain	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga tingkat desa/gampong atau nama lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	148	Perangkat Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	149	Dewan Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6	150	LEGISLATIF MPR/DPR/DPD				
	151	Keanggotaan MPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	152	Keanggotaan DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	153	Keanggotaan DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	154	Persidangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	155	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	156	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	157	Jawaban pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	158	Peninjauan/kunjungan lapangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	159	Kunjungan kerja/study banding/konsultasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7	160	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)				
	161	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	162	Persidangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	163	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	164	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	165	Sekretaris DPR Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	170	DPRD KABUPATEN/KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	172	Persidangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9	180	HUKUM				
	181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	184	Hukum internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	185	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	186	Kepenjaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	188	Hukum Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	189	Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	190	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
	191	Perwakilan asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	192	Tamu negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	193	Kerjasama diplomatik dengan negara asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	194	Perwakilan RI diluar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	195	PBB	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	196	Laporan luar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

III. POLITIK						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
	201	Perencanaan dan program pembinaan politik luar negeri	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	202	Kebijaksanaan umum	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN				
	211	Partai politik	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	212	Partai/organisasi terlarang	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Pembentukan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	222	Pembinaan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	223	Berdasarkan perjuangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	224	Berdasarkan kekayaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	225	Berdasarkan kerohanian	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	226	Lembaga adat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	Pembentukan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	232	Pembinaan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	233	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	234	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	235	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	236	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	237	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	238	Organisasi profesi dan fungsional lainnya	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	239	Jabatan fungsional lain	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	Pembentukan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	242	Pembinaan Organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	243	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	244	Organisasi Mahasiswa	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	245	Organisasi Pelajar	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	246	Gerakan Pemuda Ansor	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	247	Gerakan Pemuda Islam Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	248	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6	250	ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN				
	251	Pembentukan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	252	Pembinaan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	253	Federasi Buruh Seluruh Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	254	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	255	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	256	Keluarga Supir Proporsional Seluruh Indonesia (SPSI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	257	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7	260	ORGANISASI WANITA				
	261	Pembentukan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	262	Pembinaan organisasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	263	Dharma Wanita	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	264	Persatuan Wanita Indonesia	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	265	Pemberdayaan Perempuan (Wanita)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	266	Kongres wanita	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM) PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)				
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	272	Nomor urut/tanda gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	273	Kampanye	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
	275	Pemilih/daftar pemilih	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	276	Sarana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	277	Pemungutan suara/perhitungan suara	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	278	Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	279	KPU/KPUD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
9	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA					
	281	Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	282	Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	283	Sengketa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	284	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	7	
1	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM					
		- Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		- Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		- Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		- Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	301	Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	302	Pengawasan Trantibum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	303	Penegakan pelaksanaan Perda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	304	Pembinaan/penyuluhan pelanggaran Perda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	304	Patroli wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	306	Laporan Kunjungan VIP, VVIP, tamu asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
2	310	PERTAHANAN					
	311	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	312	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	313	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	314	Ketahanan bangsa	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	315	Ketahanan ekonomi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	316	Ketahanan seni dan budaya, agama dan kemasyarakatan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	322	Wajib militer	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	323	Operasi militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis
	324	Kekayaan TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis
	325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	332	Huru-hara/demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis
	333	Senjata api/senjata tajam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	334	Bahan peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	336	Surat-surat kaleng	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	337	Pengaduan masyarakat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	338	Himbauan atau larangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
5	340	PERTAHANAN SIPIL					
	341	Pembinaan dan Diklat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	342	Pengerahan dan pengendalian Linmas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	345	Orientasi kesadaran bela negara	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
6	350	KEJAHATAN					
	351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	353	Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	354	Subversi/penyelundupan/Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	355	Penipuan dan pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	357	Kekerasan pada perempuan dan anak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	358	Kenakalan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	359	Kejahatan lainnya (<i>trafficking</i> , hipnotis dll)	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
7	360	BENCANA					
	361	Gunung merapi/gempa/tsunami	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	362	Banjir/tanah longsor	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	363	Angin topan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	364	Kebakaran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	365	Kekeringan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	366	Posko bencana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	367	Koordinasi/unsur pengarah penanggulangan bencana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	368	MOU Pemerintah Pusat BNPB	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
8	370	KECELAKAAN					
	371	Latihan SAR	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	373	Pelatihan manajemen bagi pejabat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	374	Sarkorlak dan Satlak PBP	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	376	Latihan keterampilan pemadam kebakaran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	377	Kecelakaan darat, laut, udara	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	378	Investigasi/penyelidikan kecelakaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	379	Asuransi kecelakaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
9	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI					
	381	Perencanaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	382	Bantuan bencana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	383	Penanggulangan bencana dengan pihak lain	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	385	PUSDALOPS	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	386	Kunjungan lapangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	387	Relawan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	388	Laporan bencana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
10	390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN					
	391	Instansi pemerintah pusat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	
	392	Instansi pemerintah di daerah	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
	393	Lembaga internasional	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis
	394	Lembaga non pemerintah nasional	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Bidang Teknis

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	402	Keluarga miskin	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2.	410	PEMBANGUNAN DESA/GAMPONG				
	411	Gotong royong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	412	Perekonomian Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	413	Sarana dan Prasarana Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	414	Pengembangan Desa/Gampong	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	415	Koordinasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3.	420	PENDIDIKAN				
	421	Sekolah (termasuk akreditasi)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
	422	Administrasi sekolah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	423	Metode belajar	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	424	Tenaga pengajar (guru, dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	425	Sarana pendidikan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	426	Keolahragaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	427	Kepemudaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	428	Kepramukaan/kepanduan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	429	Pendidikan kedinasan untuk Departemen Dalam Negeri	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
4.	430	KEBUDAYAAN					
	431	Kesenian	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
	432	Kepurbakalaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	433	Sejarah	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	434	Bahasa	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	435	Usaha pertunjukkan, hiburan, kesenangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	436	Penghayat kepercayaan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5.	440	KESEHATAN				
	441	Pembinaan kesehatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	442	Obat-obatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	443	Pemberantasan dan pencegahan penyakit	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	444	Gizi dan pengawasan makanan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	445	RSU, RSJ, RS khusus	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	446	Tenaga medis	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	447	Peralatan kesehatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	448	Pengobatan alternatif	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	449	Lembaga penyedia layanan kesehatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6.	450	AGAMA				
	451	Islam	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	452	Kristen Protestan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	453	Katholik	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	454	Hindu	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	455	Budha	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
	456	Urusan haji	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	457	Kerukunan umat beragama	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	458	Aliran Sesat lainnya	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
7.	460	SOSIAL					
	461	Rehabilitasi penyandang cacat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	462	Rehabilitasi sosial	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	463	Kesejahteraan anak dan keluarga	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	464	Keperintisan dan kepahlawanan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	465	Kesejahteraan sosial	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	466	Sumbangan sosial	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	467	Bimbingan sosial	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	468	Palang Merah Indonesia (PMI)	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	469	Makam	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
8.	470	KEPENDUDUKAN					
	471	Pendaftaran penduduk					
		1 Identitas penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		2 Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		3 Perpindahan penduduk antar negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	472	Pencatatan Sipil					
		1 Kelahiran, kematian dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		2 Perkawinan, perceraian dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
		3 Pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4 Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	473	Informasi Kependudukan				
		1 Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2 Kelembagaan dan sumber daya informasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3 Pengolahan data kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4 Pelayanan Informasi Kependudukan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	474	Perkembangan Penduduk				
		1 Pengarahan kuantitas penduduk	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2 Pengembangan Kuantitas Penduduk	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3 Penataan persebaran penduduk	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4 Perlindungan dan pemberdayaan penduduk	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5 Pengembangan wawasan kependudukan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	475	Transmigrasi				
		1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2 Pemukiman transmigrasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4 Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5 Pembinaan masyarakat transmigrasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	476	Keluarga berencana	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	477	Proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	478	Monitoring dan evaluasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	479	Dokumentasi	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9.	480	MEDIA MASSA				
	481	Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	482	Media elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	483	Periklanan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	484	Kewartawanan/jurnalistik	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	485	Penyuluhan masyarakat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	486	Pembinaan bidang infokom	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	487	Hubungan antar lembaga	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	488	Fasilitasi peningkatan pelayanan nasional	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	489	Sistem naskah sosialisasi kegiatan Bupati	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10.	490	GRAFIKA				
	491	Penerangan	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	492	<i>Operation Room</i>	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	493	Hubungan masyarakat	Terbuka/Biasa	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

VI. PEREKONOMIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	500	PEREKONOMIAN				
	501	1 Dewan stabilisasi Pengadaan pangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	502	Pengadaan sandang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2.	510	PERDAGANGAN/TATANIAGA				
	511	1 Promosi perdagangan 1. Pekan raya 2. Iklan 3. Pameran, pameran non komersial 2 Pelelangan 3 Tera/timbang Pemasaran 1 Sembilan bahan pokok 2 Pasar tradisional dan modern 3 Pertokoan, kaki lima, kios	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	512	Ekspor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	513	Impor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	514	Perdagangan antar pulau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	515	Perdagangan luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	517	Aneka usaha perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	518	Koperasi (untuk BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3.	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman pangan 1 Program 1. Bimas/Inmas termasuk kredit 2. Penyuluhan 2 Produksi 1. Padi/panen 2. Palawija 3. Jagung 4. Ketela pohon/ubi-ubian 5. Hortikultura 6. Sayuran/buah-buahan 7. Tanaman hias 8. Pembudidayaan rumput laut	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		<p>3 Saran usaha pertanian 1. Peralatan (meliputi traktor dsb) 2. Pembibitan 3. Pupuk</p>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		<p>4 Perlindungan tanaman 1. Penyakit, Penyakit daun, penyakit batang 2. Hama-hama serangga, wareng, walang sangit, tungro, hama tikus, dan sejenisnya 3. Pemberantasan hama, meliputi: penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara 4. Pestisida</p>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		<p>5 Tanah pertanian pangan 1. Persawahan 2. Perladangan 3. Kebun 4. Rumpon ikan laut 5. KTA/lahan kritis 6. Pengusaha petani 7. Bina usaha 8. Pemasaran hasil 9. Kelompok tani 10. Rukun tani</p>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	522	<p>Kehutanan 1 Program 1. Hak pengusahaan hutan 2. Tata guna hutan 3. Perpetaan hutan 4. Tumpangsari</p> <p>2 Produksi 1. Kayu 2. Non kayu</p>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3 Sarana usaha kehutanan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4 Penghijauan, reboisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5 Kelestarian 1. Cagar alam, margasatwa, suaka margasatwa 2. Berburu, meliputi larangan dan izin berburu 3. Kebun binatang 4. Konservasi lahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6 Penyakit/hama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7 Jenis-jenis hutan 1. Hutan hidup 2. Hutan wisata 3. Hutan produksi 4. Hutan lindung	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	523	Perikanan dan Kelautan				
		1. Rencana, program, statistik, prospek dan pelaporan bidang perikanan dan kelautan 1. Penyuluhan 2. Teknologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Produksi perikanan 1. Standarisasi mutu hasil perikanan 2. Perikanan budidaya : CBIB, CBIC 3. Sertifikasi kesehatan ikan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Usaha Perikanan 1. Pelatihan nelayan 2. Pembinaan wanita nelayan 3. Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP 4. Perbenihan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 1. Ekspor hasil perikanan 2. Impor hasil perikanan 3. Pemasaran dalam negeri 4. Pengusaha perikanan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Sarana Perikanan 1. Pelabuhan perikanan pantai 2. TPI/PPI 3. Kesyahbandaran 4. Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pengendalian hama dan penyakit 1. Penyakit ikan 2. Hama ikan 3. Obat-obatan termasuk sertifikasinya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Konservasi dan suaka laut 1. Transplantasi bibit karang 2. Terumbu karang 3. Mangrove 4. Garam 5. Harta karun di dalam laut 6. Pembinaan/pendidikan masyarakat pesisir	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	524	Peternakan dan kesehatan hewan 1. Produksi 1. Perbibitan 2. Penyebaran dan pengembangan peternakan 3. Budidaya 4. Susu ternak rakyat 5. Telur 6. Daging 7. Kulit	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Usaha peternakan 1. Pelayanan usaha 2. Pengolahan hasil dan pemasaran 3. Pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Laboratorium kesehatan hewan 1. Pengujian mutu asal hewan 2. Pengujian mutu produk bahan asal hewan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Pembibitan dan budi daya ternak 1. Inseminasi buatan 2. Pembibitan/bibit unggul 3. Penyebaran ternak	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Sarana usaha ternak 1. Pembibitan 2. Kandang ternak	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Kesehatan hewan 1. Penyakit hewan 2. Pos kesehatan hewan 3. Test pullorum 4. Karantina 5. Pemberantasan penyakit hewan termasuk upaya pencegahannya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Makanan ternak	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Tempat pemotongan hewan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Data peternakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	525	Perkebunan 1. Program dan pelaporan 2. Produksi 1. Karet 2. Teh 3. Tembakau 4. Tebu 5. Cengkeh 6. Kelapa/kopra/kelapa sawit 7. Kopi 8. Kakao 9. Jenis tanaman yang lain	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	526	Ketahanan pangan 1. Perencanaan dan program 2. Pengembangan sarana sumber daya 3. Agribisnis 4. Distribusi pangan 5. Kewaspadaan dan keanekaragaman pangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	527	Penyuluhan 1. Sumber daya manusia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Penyelenggaraan penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4.	530	PERINDUSTRIAN				
		1. Undang-Undang Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	531	Industri logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	532	Industri mesin/elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	533	Industri kimia/farmasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	534	Industri tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	535	Industri makanan/minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	536	Aneka industri/perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	537	Aneka kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	538	Usaha negara 1. Perjan 2. Perum 3. Persero	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	539	Perusahaan Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5.	540	PERTAMBANGAN DAN KESAMUDERAAN				
	541	Minyak bumi/gas bumi 1. Pengusahaan 2. Penyaluran 3. Pengolahan, tangki, pompa, tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	542	Logam 1. Emas, perak, timah, alumunium, besi, tembaga dll	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	543	Aneka Tambang 1. Batu mulia dan galian C	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	544	Geologi 1. Vulkanologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Sumur artesis, air bawah tanah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	545	Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	546	Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	547	Pesisir pantai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6.	550	PERHUBUNGAN				
	551	Perhubungan darat 1. Lalu lintas jalan raya, sungai, danau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Keamanan lalu lintas, rambu-rambu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Angkutan jalan raya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Perizinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		5. Alat angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Terminal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Perkeretaapian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	552	Perhubungan Laut				
		1. Lalu lintas angkutan laut	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Perkapalan-alat angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Pelabuhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Pengerukan/perawatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Penjagaan pantai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		6. Angkutan barang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Keselamatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Kecelakaan, gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Perijinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	553	Perhubungan Udara				
		1. Lalu lintas angkatan udara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Pelabuhan udara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Alat angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Angkutan barang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		5. Sertifikasi kelaikan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Keamanan dan keselamatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Kecelakaan/gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Perizinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	554	Pos	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi				
		1. Kebijakan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Telepon	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Telegram	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Satelit/internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Stasiun bumi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Telex/SSB, Faximile	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	556	Pariwisata dan Rekreasi				
		1. Objek kepariwisataan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Perhotelan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Travel service	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Tempat rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	557	Meteorologi 1. Curah hujan 2. Hujan buatan 3. Peneropongan bintang 4. Ramalan cuaca 5. Kemarau panjang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
7.	560	TENAGA KERJA				
		1. Data permintaan TKI/TKW dari luar negeri 2. <i>Job order</i> TKI ke luar negeri oleh PJTKI 3. Rekrutmen calon TKI/TKW	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Seleksi naker ke luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Persyaratan naker TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pemberangkatan naker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Pemulangan naker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	561	Upah				
		1. Kegiatan dan hasil sidang dewan penelitian pengupahan daerah/nasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Permohonan penanggulangan pelaksanaan pembayaran upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Kebutuhan fisik minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Perhitungan upah kerja (termasuk di dalamnya upah lembur)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Laporan data remittance	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pembayaran gaji/upah TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	562	Penempatan				
		1. Penempatan Naker penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Kesepakatan Kerja Bersama (KLB)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Lembaga penyalur naker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja				
		1. Pendidikan kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Sarana dan prasarana latihan kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Kerjasama pelatihan tenaga kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	564	Tenaga Sukarela 1. Butsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Padat Karya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	565	Perselisihan kerja 1. Perselisihan dan perkara hukum Naker	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Pemogokan/unjuk rasa tenaga kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja 1. Instalasi proteksi kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Pemakaian alat keselamatan kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Keterangan kelayakan atau pelindung diri (APD) dalam bekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Pengangkatan dan pembinaan ahli keselamatan dan kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Pelatihan/pembinaan hyperkes dan keselamatan kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pengujian dan hasil pemeriksaan <i>hyperkes</i>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Gangguan lingkungan tempat usaha	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Perlengkapan sarana kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Ijin tenaga kerja wanita masuk malam hari (shift malam)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja				
		1. Pengaduan PHK sepihak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. PHK masal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Ijin melakukan PHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Pekerja				
		1. Bantuan kredit/bantuan modal kerja bagi Naker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Perumahan pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Keikutsertaan pekerja dalam program Jamsostek	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Koperasi pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Sarana transportasi pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Perpustakaan pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Tempat ibadah pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Rekreasi dan olah raga pekerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Pendirian, pendaftaran dan kegiatan organisasi pekerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	569	Tenaga Kerja Orang Asing				
		1. Rekomendasi perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Kualifikasi keahlian tenaga kerja asing 4. Perjanjian kerja dengan negara asing 5. Data tenaga kerja asing 6. Kecelakaan/kematian tenaga kerja asing 7. Pemulangan tenaga kerja asing 8. Pemberdayaan dan kontribusi tenaga kerja asing 9. Tenaga kerja asing ilegal	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
8.	570	PENANAMAN MODAL				
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan (<i>Joint Venture</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9.	580	PERBANKAN MONETER				
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	583	Tabungan 1. Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Tabanas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Taska	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Tapelpram	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	586	Alat pembayaran meliputi <i>check</i> , giro wesel, transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	587	Fiscal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	588	Hutang negara obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
10.	590	AGRARIA				
	591	Tata guna tanah 1. Pemetaan dan pengukuran 2. Perpetaan 3. Penyediaan data, peta dan publikasi 4. Fatwa tata guna tanah 5. Tanah kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Perpetaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Penyediaan data, peta dan publikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Fatwa tata guna tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Tanah kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	592	<i>Landreform</i>				
		1. Retribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Gadai tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Bimbingan dan penyuluhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Yayasan Dana <i>Landreform</i> (YDL)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	593	Pengurusan Hak-Hak Tanah				
		1. Penyusunan program dan bimbingan teknis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Hak milik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Hak pakai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Guna usaha	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		5. Hak guna bangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Hak pengelolaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Sengketa tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Pencabutan dan pembebasan tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	594	Pendaftaran Tanah				
		1. Pengukuran/pemetaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Dana pengukuran (Permen Agraria No. 61/1965)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	595	Lahan Transmigrasi 1. Tata guna tanah 2. <i>Landreform</i> 3. Pengurusan hak-hak tanah 4. Pendaftaran tanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	601	Tata bangunan konstruksi dan industri konstruksi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	602	Kontraktor pemborong 1. Tender	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		2. Penunjukkan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		3. Prakuualifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan 1. Tanah dan batu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		2. Aspal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Besi dan logam lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		4. Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, <i>tech oil</i> , pengawet kayu)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		5. Semen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		6. Kayu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		7. Bahan penutup atap	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		8. Alat-alat penggantung dan pengunci	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		9. Bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	605	Instalasi				
		1. Instalasi bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		2. Instalasi listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		3. Instalasi air/sanitasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	606	4. Instalasi pengatur udara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		5. Instalasi akustik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		6. Instalasi cahaya/penerangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		Konstruksi pencegahan				
		1. Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		2. Terhadap gempa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		3. Terhadap angin/udara/panas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		4. Terhadap kegaduhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		5. Terhadap gas/ <i>explosive</i>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		6. Terhadap serangga	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	7. Terhadap radiasi atom	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
2.	610	PENGAIRAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	611	Irigasi				
		1. Bangunan waduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		2. Bangunan pengambilan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		3. Bangunan pembawa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		4. Bangunan pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		5. Bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	612	Folder				
		1. Tanggul keliling	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Bangunan pembawa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Bangunan pembuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Bangunan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	613	Pasang Surut 1. Bangunan pembawa 2. Bangunan pembuangan 3. Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	614	Pengendalian sungai 1. Bangunan pengaman 2. Salurang pengaman 3. Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	615	Pengaman pantai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	616	Air tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	620	JALAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	621	Jalan Kota/Kabupaten 1. Daerah penguasaan 2. Bangunan sementara 3. Badan jalan 4. Perkerasan 5. Drainase 6. Buku trotoir 7. Median 8. Daerah sampingan 9. Bangunan pelengkap dan pengaman	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	622	Jalan Provinsi 1. Daerah penguasaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Bangunan sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Badan jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Perkerasan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Drainase	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Trotoir	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Median	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Daerah sampingan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		9. Bangunan perlengkapan dan pengamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	623	Jalan layang	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4.	630	JEMBATAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
5.	633	Jembatan gantung	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	640	BANGUNAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	641	Bangunan pemerintah 1. Gedung pengadilan 2. Rumah pejabat negara 3. Gedung DPR 4. Gedung balai kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	642	Bangunan pendidikan 1. Taman kanak-kanak 2. SD dan Sekolah Menengah 3. Perguruan Tinggi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
Terbuka	Eselon III		Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis		
Terbuka	Eselon III		Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis		

1	2	3	4	5	6	7
	643	Bangunan rekreasi 1. Bangunan olahraga 2. Gedung kesenian 3. Gedung pemancar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	644	Bangunan perdagangan 1. Pusat perbelanjaan (pasar, mall, supermarket, dept. store) 2. Gedung perdagangan 3. Bank 4. Perkantoran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	645	Bangunan pelayanan umum 1. Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum 2. Gedung parkir	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		3. Rumah sakit	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Gedung telkom	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Terminal angkutan umum	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Terminal angkutan air	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Terminal angkutan darat/halte	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Bangunan keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	646	Bangunan peninggalan sejarah				
		1. Monumen	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Candi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Kraton	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		4. Rumah tradisional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	647	Bangunan industri	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	648	Bangunan tempat tinggal 1. Rumah perkantoran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Rumah pedesaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. <i>Real estate</i>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	649	Elemen bangunan 1. Pondasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Dinding	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Atap	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Lantai/langit-langit	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
6.		5. Pintu/jendela	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	650	TATA RUANG KOTA	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	651	Daerah perdagangan/pelabuhan 1. Daerah pusat perbelanjaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Daerah perkotaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	652	Daerah Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	653	Daerah perumahan (<i>site & service</i>) 1. Kepadatan rendah (<i>low density</i>)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Kepadatan tinggi (<i>high density</i>)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	654	Daerah industri 1. Industri berat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Industri ringan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Industri rumah (<i>home industri</i>)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	655	Daerah rekreasi (<i>open space</i>) 1. Taman kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Tempat olahraga dan bermain	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Ruang terbuka	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	656	Transportasi 1. Jaringan jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Jaringan kereta api	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Jaringan sungai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	657	Assainering 1. Saluran pengumpulan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	658	2. Instalasi pengolahan 3. Unit perpompaan Kesehatan lingkungan 1. Persampahan 2. Pengotoran udara 3. Pengotoran air 4. Kegaduhan/polusi udara 5. Kebersihan kota	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
7.	660	TATA LINGKUNGAN				
		1. Lingkungan hidup 2. Kebersihan lingkungan	Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
		3. Pencemaran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	661	Daerah hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	662	Daerah pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	663	Daerah pemukiman	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	664	Pusat pertumbuhan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	665	Transportasi					
		1. Jaringan jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		2. Jaringan kereta api	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
		3. Jaringan sungai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
8.	670	KETENAGAAN					
		1. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
	671	Listrik 1. Kelistrikan 2. Pembangkit tenaga listrik 3. Transmisi tenaga listrik 4. Distribusi tenaga listrik 5. Pengusahaan listrik	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	672	Tenaga air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	673	Tenaga minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	674	Tenaga gas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	675	Tenaga matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	676	Tenaga nuklir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
9.	677	Tenaga panas bumi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	678	Tenaga uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	679	Tenaga lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	680	PERALATAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	690	AIR MINUM	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	691	Intake					
		1. <i>Broncaptering</i>		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Sumur		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Bendungan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4. Saringan (<i>screen</i>)			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	5. Pintu air		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
		6. Saluran pembawa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Alat ukur	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Perpompaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	692	Transmisi air baku				
		1. Perpipaian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Katup udara (Air Rolief)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Tutup penguras (<i>Blow oof</i>)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Bak pelepas tekanan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. Jembatan pipa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. <i>Syphon</i>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	693	Instalasi pengelolaan 1. Bangunan ukur 2. Bangunan aerasi 3. Bangunan pengendapan 4. Bangunan pembubuh bahan kimia 5. Bangunan pengaduk 6. Bangunan saringan 7. Perpompaan 8. <i>Clear Hell</i>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	694	Distribusi 1. Reservoir menara bawah tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Perpipaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		3. Perpompaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		4. Jembatan pipa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		5. syphon	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		6. Hydran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		7. Katup	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		8. Bak pelepas tekanan (<i>pressuer reducing valve</i>)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

VIII. PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	PENGAWASAN				
		1. Kebijakan dan program pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	701	Bidang urusan dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	702	Bidang peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	703	Bidang kekayaan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	704	Bidang perpustakaan/dokumentasi/kearsipan/sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	705	Bidang perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	706	Bidang organisasi/ketatalaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	707	Bidang penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	708	Bidang konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	709	Bidang perjalanan dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2.	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	712	Pengawasan Pemerintahan Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	713	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	714	Pengawasan Pemerintahan Desa/Gampong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	715	Bidang MPR/DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	716	Bidang DPRA	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
3.	717	Bidang DPRK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	718	Bidang hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	719	Bidang hubungan luar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	720	BIDANG POLITIK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	721	Bidang kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	722	Bidang organisasi kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	723	Bidang organisasi profesi dan fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	724	Bidang organisasi pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	725	Bidang organisasi buruh, tani dan nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
4.	726	Bidang organisasi wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	727	Bidang pemilihan umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	731	Bidang pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	732	Bidang kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	733	Bidang perlindungan masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	734	Bidang keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	735	Bidang kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	736	Bidang bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	737	Bidang kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
5.	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	741	Bidang Pembangunan Desa/Gampong	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	742	Bidang pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	743	Bidang kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	744	Bidang kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	745	Bidang agama	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	746	Bidang sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	747	Bidang kependudukan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	748	Bidang media massa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6.	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	751	Bidang perdagangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	752	Bidang pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	753	Bidang perindustrian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	754	Bidang pertambangan/kesamuderaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	755	Bidang perhubungan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	756	Bidang tenaga kerja	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	757	Bidang permodalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	758	Bidang perbankan/moneter	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	759	Bidang pertanahan/agraria	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7.	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	761	Bidang pengairan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	762	Bidang jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	763	Bidang jembatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	764	Bidang bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	765	Bidang tata kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	766	Bidang lingkungan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	767	Bidang ketenagaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	768	Bidang peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	769	Bidang air minum	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8.	780	BIDANG KEPEGAWAIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	781	Bidang pengadaan PNS	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	782	Bidang mutasi pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	783	Bidang kedudukan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	784	Bidang kesejahteraan pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	785	Bidang cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	786	Bidang penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	787	Bidang tata usaha kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	788	Bidang pemberhentian pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	789	Bidang pendidikan pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
9.	790	BIDANG KEUANGAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	791	Bidang anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	792	Bidang otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	793	Bidang verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	794	Bidang pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	795	Bidang perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	796	Bidang pembinaan kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	797	Bidang pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	799	Bidang bendaharawan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

IX. KEPEGAWAIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	800	KEPEGAWAIAN				
2.	810	PENGADAAN				
	811	Pendaftaran CPNS	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	812	Pengujian kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	813	Pengangkatan CPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	814	Pengangkatan tenaga lepas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3.	820	MUTASI				
	821	Pengangkatan 1. Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji 3. Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	
	822	Kenaikan gaji berkala	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	823	Kenaikan pangkat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	824	Pemindahan/pelimpahan/pembantuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	825	Datasering dan penempatan kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	826	Penunjukkan tugas belajar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	827	Wajib militer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	828	Mutasi pegawai instansi lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
4.	830	KEDUDUKAN					
	831	Perhitungan masa kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	832	Penyesuaian pangkat/gaji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	
	833	Penghargaan ijazah/penyesuaian ijazah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	834	Penghargaan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
5.	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI					
	841	Tunjangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	842	Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	843	Perawatan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	844	Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	845	Perumahan PNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	846	Bantuan sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	
	847	Rekreasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7
	848	Dispensasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6.	850	CUTI				
	851	Cuti tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	852	Cuti besar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	853	Cuti sakit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	854	Cuti hamil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	855	Cuti naik haji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	856	Cuti diluar tanggungan negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	857	Cuti alasan lain, cuti alasan penting	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7.	860	PENILAIAN				
	861	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	862	Hukuman 1. Teguran peringatan 2. Penundaan kenaikan gaji 3. Penurunan pangkat 4. Pemindahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	863	Kondite, DP3, disiplin pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	864	Ujian dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	865	Penilaian kinerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8.	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
	871	Formasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	872	<i>Bezetting</i> /daftar urut kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	873	Registrasi, sistem informasi kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	874	Daftar riwayat pekerjaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	875	Kewenangan mutasi kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	876	Penggajian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	877	Sumpah/janji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	876	Korps Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9.	880	PEMBERHENTIAN				
	881	Atas permintaan sendiri termasuk pengunduran diri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	882	Dengan hak pensiun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	883	Karena meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	884	Alasan lain, diantaranya Keuzuran Jasmani	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	885	Uang pesangon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	886	Uang tunggu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	887	Uang sementara waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	888	Tidak dengan hormat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10.	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
	891	Perencanaan program dan pelaporan diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	892	Pendidikan reguler/kader	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	893	Pendidikan dan pelatihan/non reguler	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	894	Pendidikan luar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	895	Metode	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	896	Tenaga pengajar/widyaiswara/narasumber	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	897	Administrasi pendidikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	898	Fasilitas belajar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	899	Sarana pendidikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

X. KEUANGAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	KEUANGAN				
	901	Nota keuangan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	902	APBN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	903	APBD	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	904	Dana Alokasi Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	905	Dana Alokasi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2.	910	ANGGARAN				
		1. Keputusan tentang penunjukkan pengelola keuangan SKPD/PPKD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
		2. Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	913	Anggaran belanja tambahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)				
		1. Daftar Usulan Kegiatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)				
		1. Daftar Usulan Proyek (DUP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
		2. Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	916	Revisi anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
3.	920	OTORISASI/SKO				
	921	Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	922	Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	923	SUP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	924	Ralat SKO	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4.	930	VERIFIKASI				
	931	SPM rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	932	SPM pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	933	Penerimaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	934	SPJ Rutin	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	935	SPJ pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	936	Nota pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	937	SP pemindahan pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
5.	940	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan perhitungan anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	942	Permintaan data anggaran, laporan fisik pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6.	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	952	Tuntutan bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	953	Penghapusan kekayaan negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	954	Pengangkatan/penggantian pemimpin proyek dan pengangkatan pemberhentian bendaharawan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	955	<i>Specimen</i> tanda tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	956	Surat tagihan piutang, ikhtisar bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7.	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
8.	961	Pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	962	Pemeriksaan administrasi bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	963	Laporan keuangan bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	970	PENDAPATAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	971	Perimbangan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	972	Subsidi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	974	Retribusi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	975	Bea	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	976	Cukai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	977	Pungutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	978	Bantuan Presiden, Kementerian dan bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9.	990	BENDA HARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002